



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan
dan Anak-Anak dalam MINUSCA Tahun 2015-2017**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Teresa Retno Arsanti

2014330140

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan
dan Anak-Anak dalam MINUSCA Tahun 2015-2017**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Teresa Retno Arsanti

2014330140

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Teresa Retno Arsanti
Nomor Pokok : 2014330140
Judul : Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
terhadap Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

Sekretaris
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

Anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teresa Retno Arsanti

NPM : 2014330140

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap

Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 03 Juli 2018

Teresa Retno Arsanti



2014330140

ABSTRAK

Nama : Teresa Retno Arsanti
NPM : 2014330140
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017

Eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelanggaran terhadap tujuan, prinsip, dan kode etik PBB. Pada tahun 2015-2017, mayoritas pelanggaran tersebut terjadi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah, MINUSCA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan pasukan perdamaian MINUSCA melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Isu eksploitasi dan pelecehan ini menjadi penting karena pasukan pemelihara perdamaian yang seharusnya memberi rasa aman pada masyarakat sipil, justru memberi ancaman keamanan dan perdamaian. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan penelitian, “Apa faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam MINUSCA?”

Teori dan konsep yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual dalam MINUSCA tersebut, di antaranya adalah feminisme global/post-kolonial dan *power over*. Teori feminisme global/post-kolonial digunakan penulis untuk mengetahui konteks dinamika politik dan ekonomi dunia ketiga yang berdampak pada isu gender. Sedangkan *power over*, yang ditentang oleh feminis karena memiliki kecenderungan maskulin, memberi gambaran lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual tersebut.

Melalui penelitian ini dihasilkan analisa tiga faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam MINUSCA. Faktor-faktor tersebut adalah politik dan ekonomi, serta imunitas yang dimiliki oleh pasukan pemelihara perdamaian.

Kata Kunci : Eksploitasi dan pelecehan seksual, perempuan dan anak-anak, pasukan pemelihara perdamaian, PBB, MINUSCA, faktor penyebab, politik, ekonomi, dan imunitas

ABSTRACT

Name : Teresa Retno Arsanti
Student Number : 2014330140
Thesis' Title : Cause Factors of Sexual Exploitation and Abuse against Women and Children in MINUSCA 2015-2017

Sexual exploitation and abuse (SEA) against women and children occurs in the peacekeeping operation is a violation of the purpose, principle, and code of conduct of the United Nations. The misconduct mostly happens in MINUSCA, the peacekeeping operation in the Central African Republic. The purpose of this research is to describe the cause factors of sexual exploitation and abuse done by the peacekeepers of MINUSCA against women and children in depth. The sexual exploitation and abuse issue becomes important because the peacekeepers, the ones who ought to maintain the peace, threatens the peace and security in the land of the mission. In line with this context, the question raised in this research is, "What are the cause factors of sexual exploitation and abuse against women and children in MINUSCA?"

The theory and concept adopted to help to understand the cause factors of sexual exploitation and abuse against women and children in MINUSCA are the global/post-colonial feminism and power over. Global/post-colonial feminism is used to understand the context of political and economic dynamics that affect the gender issue. The concept of power over, which is opposed by the feminism because of its masculinity, gives further explanations about the factors that cause the perpetrators to do the sexual exploitation and abuse.

Three cause factors of sexual exploitation and abuse against women and Children in MINUSCA are found through this research. Those cause factors are political and economic, and the immunity held by the peacekeepers.

Keywords: sexual exploitation and abuse, women and children, peacekeepers, United Nations, MINUSCA, cause factors, political, economic, and immunity

KATA PENGANTAR

Pada awal mencari topik penelitian, penulis yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu gender, menemukan dan merasa bahwa kasus eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Dan setelah berproses dalam penelitian ini, penulis bersyukur karena penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan syukur tersebut, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan syukur dan terima kasih tersebut ingin penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis merasa memiliki simbol tempat bernaung ketika mengalami kesulitan dalam proses penulisan ini.
2. Ayah, Ibu, dan Mbak Tamara. Mereka adalah sebuah anugerah terindah yang dapat penulis rasakan. Terima kasih atas dukungan tiada henti baik secara moral maupun finansial.
3. Dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional yang sudah membuat penulis belajar banyak dan membuka pemikiran penulis akan dunia internasional ini. Terutama, kepada Mbak Nophie, Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D, selaku dosen pembimbing dan inspirator penulis. Terima kasih Mbak Nophie karena telah memperkenalkan isu gender dan memberi contoh mengenai bagaimana menjadi seorang Ibu, dosen, dan aktivis yang baik. Lalu, kepada Dr Yulius Purwadi Hermawan yang telah memberi penulis

kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai penelitian. Tidak lupa juga pada dosen-dosen yang tergabung dalam PACIS dan telah memberi kesempatan penulis untuk belajar.

4. Fitri Bintang Timur, Ph. D, yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk mewawancarai Beliau. Terima kasih sudah berkenan membagi ilmu kepada penulis dan mencerahkan penulis.
5. Teman-teman HI 2014, anggota Chand++ (Jeje, Kevin, Agung, Isis, Natan, Jeremy Foster, Yunas, Cam-Cam, Mike, Cabbain, Rio, dan Greg) yang telah memberi kesempatan penulis untuk bergabung dalam *peer group* ini. Lalu kepada Grace Jessy Ciputri yang telah menjadi sahabat dan pendengar yang baik. Dan tidak lupa juga Kevin Ferriane yang telah melengkapi slogan FISIP bagi penulis.
6. Teman-teman PSM penulis yang telah mewarnai kehidupan penulis dari sore hingga malam dengan 28 SKSnya. Terima kasih Mbak Rose, Bos Adek Hana, Master, Christo, Ignes, Albert, Blorong, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu-satu.
7. Teman-teman Medicomrade yang sudah menemani penulis selama 3 tahun bertugas di Osfak dan Bakdes.

Bandung, 03 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Tinjauan Pustaka	8
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.1 Metode Penelitian.....	17

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II	
Isu Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	21
2.1 Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Bertentangan dengan Nilai-Nilai Universal PBB	21
2.2 Misi Pemeliharaan Perdamaian sebagai Arena Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	25
2.2.1 Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa	25
2.2.2 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB	28
2.2.3 Prinsip-Prinsip Misi Pemeliharaan Perdamaian yang Dilanggar dalam Tindakan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	32
2.3 Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam Misi Pemeliharaan PBB.....	36
2.4 Respons PBB mengenai Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian	41
BAB III	
MINUSCA yang Sarat dengan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.....	52
3.1 Ketidakstabilan Politik Republik Afrika Tengah dari Kolonialisme Hingga Perang Sipil	53
3.2 Perekonomian Republik Afrika Tengah dengan Mayoritas Populasi di Garis Bawah Kemiskinan	62

3.3 Misi Perdamaian di Republik Afrika Tengah	66
3.4 MINUSCA sebagai Misi Perdamaian dengan Kecenderungan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	70
BAB IV	
Analisa Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam MINUSCA.....	79
4.1 Ketidakstabilan Politik yang Berdampak pada Ruang Personal.....	80
4.2 Kemiskinan Republik Afrika Tengah sebagai Penyebab Dominasi Pasukan Pemelihara Perdamaian	85
4.3 Imunitas Pasukan Pemelihara Perdamaian	88
BAB V	
Kesimpulan.....	93
DAFTAR REFERENSI	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Misi Perdamaian PBB	28
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3.1 Jumlah Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	38
Grafik 2.3.2 Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	39
Grafik 2.3.3 Kategori Personel Pelaku Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	40
Grafik 2.3.4 Kategori Usia Korban dalam Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	40
Grafik 2.4.1 Status dan Hasil Investigasi Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	45
Grafik 3.2.1 GDP Per <i>Capita</i> Republik Afrika Tengah	63
Grafik 3.2.1 GDP Per <i>Capita</i> Republik Afrika Tengah	64
Grafik 3.2.3 Tingkat Pengangguran di Republik Afrika Tengah	65
Grafik 3.4.1 Jumlah Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MINUSCA	71
Grafik 3.4.2 Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MINUSCA	73
Grafik 3.4.3 Kategori Personel Pelaku Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MINUSCA	74
Grafik 3.4.4 Kategori Usia Korban dalam Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MINUSCA	75

Grafik 3.4.5 Status dan Hasil Investigasi Kasus Dugaan SEA dalam MINUSCA ..77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Perbandingan Misi Pemeliharaan Perdamaian	30
Tabel 2.4.1. Tindak Lanjut terhadap Pelaku Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	46
Tabel 2.4.2 Resolusi dan <i>Presidential Statement</i> DK PBB mengenai <i>Women, Peace, and Security</i> yang membahas SEA	50
Tabel 3.4.1 Jumlah Kasus Dugaan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Misi PBB..	72

DAFTAR ISTILAH

BINUCA	<i>United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic</i>
BONUCA	<i>UN Peace-Building Support Office in the Central African Republic</i>
CLO	<i>Chief Logistic Officers</i>
CITM	<i>Core Induction Training Materials</i>
CPJP	<i>Convention des Patriots pour la Justice et la Paix</i>
CPTM	<i>Core Deployment Training Materials</i>
DDR	<i>Disarmament, Demobilization, and Reintegration</i>
DFS	<i>Department of Field Support</i>
DK PBB	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPA	<i>Department of Political Affairs</i>
ECCAS	<i>Economic Community of Central African States</i>
ECHA/ECPS	<i>the Executive Committes on Humanitarian Affairs and Peace and Security</i>
EUFOR	<i>European Force</i>
FACA	<i>Forces Armees Centrafricaines</i>
FROCCA	<i>Front pour le retour a l'orde constitutionnel en Centrafique</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>

HAM	Hak Asasi Manusia
HI	Hubungan Internasional
HRW	<i>Human Right Watch</i>
IASC	<i>Inter-Agency Standing Committe</i>
IDP	<i>Inclusive Political Dialogue</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
LRA	<i>Lord's Resistance Army</i>
MICOPAX	<i>Mission in Central African Republic</i>
MINUJUSTH	<i>United Nations Mission for Justice Support in Haiti</i>
MINURCA	<i>United Nations Mission in the Central African Republic</i>
MINURCAT	<i>United Nations Mission in the Central African Republic and Chad</i>
MINURSO	<i>United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara</i>
MINUSCA	<i>United Nations Multidimesional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic</i>
MINUSMA	<i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali</i>
MISAB	<i>An Inter-African Force in the Central African Republic</i>
MISCA	<i>Mission Internationale de soutien a la Centrafrique</i>
MONUSCO	<i>United Nations Organization Stabilization Mission In The Dr Congo</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MTS	<i>Misconduct Tracking System</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organizations</i>
OIOS	<i>Office of Internal Oversight Services</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCC	<i>Police Contributing Countries</i>
PKO	<i>Peacekeeping Operations</i>
PSEA	<i>Protection Against Sexual Exploitation and Abuse</i>
PSC	<i>Peace and Security Council</i>

SAP	<i>Structural Adjustment Programme</i>
SEA	<i>Sexual Exploitation and Abuse</i>
SIU	<i>Special Investigation Unit</i>
SOP	<i>Standar Operating Procedure</i>
SSR	<i>Security Sector Reform</i>
TCC	<i>Troops Contributing Countries</i>
UFDR	<i>Union des Force Democratiques pour le Rassemblement</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNAMID	<i>United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur</i>
UNDOF	<i>United Nations Disengagement Observer Force</i>
UNEF	<i>United Nations Emergency Force</i>
UNFICYP	<i>United Nations Peacekeeping Force in Cyprus</i>
UNIFIL	<i>United Nations Interim Force in Lebanon</i>
UNISFA	<i>United Nations Interim Security Force for Abyei</i>
UNMIK	<i>United Nations Mission in Kosovo</i>
UNMISS	<i>United Nations Mission in South Sudan</i>
UNMOGIP	<i>United Nations Military Observer Group in India and Pakistan</i>
UNSMIS	<i>United Nations Supervision Mission in Syria</i>
UNTSO	<i>United Nations Truce Supervision Organization</i>
WB	<i>World Bank</i>

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations peacekeepers*) telah berkomitmen dalam *The UN Standards of Conduct*. Komitmen tersebut didasari oleh, pertama, prinsip-prinsip efisiensi, kompetensi, dan integritas; kedua, *zero tolerance policy* dalam eksploitasi dan pelecehan seksual atau *sexual exploitation and abuse* (SEA); dan ketiga, prinsip akuntabilitas. Pasukan pemelihara perdamaian merupakan personel perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, menyediakan, dan memelihara kedamaian, dalam bentuk keamanan dan politik, bagi negara-negara konflik yang sedang bertransisi.¹

PBB merupakan sebuah entitas yang turut ambil bagian dalam dinamika hubungan internasional untuk menjaga perdamaian, bersama dengan negara-negara anggota yang tergabung di dalamnya. Kehadiran PBB sendiri merupakan sebuah fenomena munculnya entitas selain negara untuk merespons tren konflik dalam dunia internasional. Penyebaran pasukan pemelihara perdamaian PBB sendiri merupakan sebuah respons atas tren konflik dalam dunia internasional dewasa ini, yang mencakup tidak hanya konflik antar negara, namun juga konflik dalam negara. Dan dengan persetujuan negara terkait, yang memiliki keterbatasan dalam

¹ "Overview", *Conduct in UN Field Missions*, diakses pada 13 September 2017 melalui <https://conduct.unmissions.org/standards-overview>

menyelesaikan konflik tersebut, pasukan pemelihara perdamaian PBB pun disebar dalam negara-negara yang mengalami konflik, khususnya konflik internal.

Penyebaran pasukan pemelihara perdamaian PBB disertai dengan kewajiban dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas perdamaian. Kewajiban dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB dibuat selaras dengan tujuan PBB yang termuat dalam *UN Charter* (Piagam PBB) Bab I Artikel 1 yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam memenuhi tujuan tersebut, PBB mengambil tindakan kolektif untuk pencegahan hingga penghilangan ancaman terhadap perdamaian dengan jalan damai.²

Tindakan kolektif yang diambil oleh PBB untuk memelihara perdamaian dalam aktor-aktor, khususnya negara, yang berkonflik dan sedang dalam transisi menuju damai, dapat dilihat dalam misi pencegahan konflik dan mediasi, *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. *Peacemaking* secara umum berfokus untuk menangani konflik yang sedang berlangsung dan menggunakan aksi diplomatis untuk mencapai kesepakatan. *Peacekeeping* lebih berfokus untuk mendukung implementasi dalam kesepakatan damai aktor-aktor yang bermusuhan, sedangkan dalam memperkuat kapasitas nasional merupakan misi dalam *peacebuilding*.³

Misi pemeliharaan perdamaian PBB dapat dilakukan sesuai dengan tiga prinsip dasar yang berkaitan dengan kesediaan aktor atau pihak yang berkonflik, ketidakberpihakan, dan *non-use of force*.⁴ Misi pemeliharaan perdamaian atau

² “Chapter I: Purposes and Principles”, *United Nations*, diakses pada 13 September 2017 melalui <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

³ “Peace and Security”, *United Nations*, diakses pada 13 September 2017 melalui <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peace.shtml>

⁴ “What is peacekeeping?”, *United Nations*, diakses pada 13 September 2017 melalui <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>

Peacekeeping Operation (PKO) merupakan misi multidimensional yang dimulai pada tahun 1948 ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengizinkan penyebaran pasukan di Timur Tengah dalam kasus *Armistice Agreement* antara Israel dan Arab. Sejak tahun 1948, 71 misi pemeliharaan perdamaian telah disebar. Dalam pelaksanaannya misi pemeliharaan perdamaian pun dilakukan dengan bantuan lebih dari 120 negara partisipan.⁵ Hingga kini, terdapat 14 misi PKO yang masih berlangsung di Afrika, Amerika, Timur Tengah, dan Asia.⁶

Salah satu misi pemeliharaan perdamaian yang masih berlangsung di Afrika adalah misi di Republik Afrika Tengah. MINUSCA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*) merupakan sebuah misi pemeliharaan perdamaian yang merespons adanya konflik internal di Republik Afrika Tengah. Misi pemeliharaan perdamaian tersebut dibutuhkan sebagai sarana untuk stabilisasi keadaan di Republik Afrika Tengah pasca konflik internal yang disebabkan oleh dua kelompok besar pemberontak yaitu Seleka dan Anti-Balaka. Sesuai dengan mandat PBB, salah satu prioritas dari MINUSCA adalah untuk melindungi masyarakat sipil di daerah konflik tersebut. Namun, dalam pelaksanaan misi tersebut, justru timbul ancaman perdamaian baru berupa eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

⁵ "History of peacekeeping", *United Nations*, diakses pada 21 Juni 2018 melalui <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml>

⁶ "Current peacekeeping operations", *United Nations*, diakses pada 21 Juni 2018 melalui <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml>

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi masalah

Pasukan pemelihara perdamaian PBB sebagai entitas yang menjalankan misi di daerah konflik, justru melanggar *The UN Standards of Conduct* dengan melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi, khususnya perempuan dan anak-anak. Pasukan Perdamaian PBB yang seharusnya memiliki integritas justru melanggar *zero tolerance policy* dengan melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual. Pelanggaran tersebut bahkan diakui oleh PBB dan dipublikasikan dalam *website* resmi yang dimiliki oleh PBB.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bahkan menyatakan bahwa misi pemeliharaan perdamaian di Afrika merupakan suatu kegagalan karena berbagai faktor terutama kegagalan untuk melindungi masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Pasukan perdamaian PBB yang memiliki tugas untuk mempersiapkan, menyediakan, dan memelihara kedamaian, dalam bentuk keamanan dan politik, bagi negara-negara konflik yang sedang bertransisi, justru menimbulkan konflik baru dalam ranah seksual.⁷

MINUSCA, sebuah misi pemeliharaan perdamaian yang diberi mandat utama untuk melindungi masyarakat sipil, pun merupakan sebuah misi yang penuh ancaman akan keamanan dan perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan MINUSCA sebagai sebuah misi yang memiliki paling banyak jumlah kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual sepanjang tahun 2015-2017. Menurut laporan dari PBB,

⁷ Tomi Oladipo, "The UN's peacekeeping nightmare in Africa", *BBC*, 5 Januari 2017, diakses pada 13 September 2017 melalui <http://www.bbc.com/news/world-africa-38372614>

kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual pada tahun 2016 dalam misi tersebut bahkan mencapai 52 jumlah kasus.⁸ Selain itu, sejumlah 41 pasukan perdamaian PBB terlibat dalam kasus eksploitasi dan pelecehan seksual. Eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB terhadap perempuan tersebut bahkan merupakan sebuah bentuk perdagangan demi para korban mendapatkan makanan dan pakaian.⁹ Keamanan dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan sehari-hari justru diperburuk oleh pasukan perdamaian PBB.

Kasus eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian memiliki angka yang lebih banyak daripada angka yang telah dipublikasikan. Hal tersebut dapat terjadi karena korban eksploitasi dan pelecehan seksual belum bisa melaporkan tindakan pelanggaran tersebut. Ketidaktahuan prosedur melapor, rasa malu, trauma, ketakutan, dan rasa pesimis bahwa pelaku yang melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual akan diadili menjadi faktor-faktor yang membuat korban eksploitasi dan pelecehan seksual tidak melaporkan diri. Bahkan, adanya anggapan di Republik Afrika Tengah bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan oleh pasukan pemelihara perdamaian merupakan hal biasa pun, menjadi alasan korban enggan melaporkan diri.¹⁰ Adanya anggapan bahwa pemerkosaan adalah hal yang biasa dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian, merupakan sebuah bukti bahwa pelanggaran ini secara

⁸ “Sexual Exploitation and Abuse : Allegations”, *Conduct in UN Field Missions*, diakses pada 22 Juni 2018 melalui <https://conduct.unmissions.org/sea-overview>

⁹ Tomi Oladipo, *Op.Cit.*,

¹⁰ Christian Locka dan Jabeen Bhatti, “USA Today : U.N. Fails to Stems Rape by Peacekeepers in Africa, Victims Cry”, *Code Blue*, 16 Januari 2018, diakses pada 22 Juni 2018 melalui <http://www.codebluecampaign.com/archived-news/2018/1/16>

masif terjadi dalam misi pemeliharaan perdamaian, salah satunya dalam MINUSCA.

Dalam pelaksanaan misi perdamaian tersebut, PBB telah memberikan pelatihan dan *code of conduct* mengenai bagaimana seharusnya pasukan perdamaian PBB mewujudkan perdamaian di daerah konflik. Bahkan sebagai respons atas berbagai kasus eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB, DK PBB pun mengutuk tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual tersebut. DK PBB pun mengeluarkan resolusi pada 11 Maret 2016 mengenai misi pemeliharaan perdamaian. Dalam resolusi tersebut, DK PBB menyatakan keprihatinan dan menegaskan bahwa eksploitasi dan pelecehan seksual melemahkan implementasi mandat dan kredibilitas misi pemeliharaan perdamaian. DK PBB juga menegaskan kembali dukungannya atas *zero tolerance policy*.¹¹

PBB telah berupaya mencegah serta merespons eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB. Namun, fenomena eksploitasi dan pelecehan seksual tersebut masih terjadi hingga dewasa ini dan dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB kepada masyarakat sipil yang justru seharusnya dilindungi dan mendapat jaminan keamanan.

Berdasar uraian fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian mengenai **Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017.**

¹¹ “Resolution 2272 (2016) Adopted by the Security Council at its 7643rd meeting, on 11 March 2016”, *United Nations Security Council*, diakses pada 01 Oktober 2016 melalui [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2272\(2016\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2272(2016))

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pasukan pemelihara perdamaian PBB sebagai aktor atau pelaku eksploitasi dan pelecehan seksual. Selain melihat aktor, penelitian berfokus pada perempuan dan anak-anak sebagai korban eksploitasi dan pelecehan seksual.

Penelitian ini dibatasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang dilakukan di benua Afrika, khususnya di Republik Afrika Tengah, dalam MINUSCA. MINUSCA dipilih menjadi objek penelitian karena selama kurun waktu 2015-2017, kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual paling banyak terjadi dalam misi tersebut. Sebanyak 39,57% dari total kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual seluruh misi perdamaian terjadi dalam MINUSCA.

Pemilihan rentang waktu dari tahun 2015 karena pada tahun tersebut mulai dipublikasikan adanya pelanggaran kasus dugaan eksploitasi dan pelecehan seksual dalam MINUSCA. Sedangkan tahun 2017 dipilih sebagai batas waktu objek penelitian untuk menunjukkan perkembangan situasi isu terkait.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan arah penelitian yang dibuat, penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan, yaitu **“Apa faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam faktor penyebab yang mempengaruhi atau mendorong pasukan perdamaian PBB untuk melakukan eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Afrika Tengah, MINUSCA, pada tahun 2015-2017.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah untuk menambah wawasan pembaca mengenai realita fenomena eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB dalam misi perdamaian di Republik Afrika Tengah, MINUSCA, pada tahun 2015-2017. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB dalam misi perdamaian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB telah cukup dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah ditulis serta dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, atau artikel. Dari berbagai penelitian tersebut, penulis menggunakan tiga tulisan penelitian sebagai perbandingan acuan dan kajian literatur.

Dalam seri buku *Oxford Studies in Gender and International Relations*, terdapat dua buku yang secara khusus membahas mengenai gender dan misi pemeliharaan perdamaian serta gender dan keamanan global politik. Buku pertama membahas tentang bagaimana perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pada Bab 5, yang berjudul *The Spoils of Peace SEAHV in Peacekeeping Operations*, terdapat pembahasan tentang eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Tulisan ini melihat adanya nilai dalam kesetaraan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Tulisan ini melihat perlunya reformasi yang berkaitan dengan gender untuk merekrut dan melatih pasukan perdamaian PBB agar memiliki kesadaran lebih serta sensitif terhadap potensi adanya eksploitasi dan pelecehan seksual. Misi pemeliharaan perdamaian yang disertai dengan adanya eksploitasi dan pelecehan seksual dianggap sebagai ancaman keamanan kemanusiaan dalam misi tersebut. Eksploitasi dan pelecehan seksual juga turut dianggap sebagai ancaman karena dapat menimbulkan adanya *mistrust* atau ketidakpercayaan antara populasi lokal dan misi pemeliharaan perdamaian. Selain itu eksploitasi dan pelecehan seksual dilihat sebagai anti-tesis terhadap tujuan PBB yang justru untuk meningkatkan perdamaian, karena dalam implementasinya justru menimbulkan konflik kepercayaan dan keamanan. Eksploitasi dan pelecehan seksual juga dianggap sebagai hal yang melanggar kesetaraan gender. Tulisan ini memaparkan bahwa dalam melihat penyebab terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual dibutuhkan kontekstualisasi dalam lingkungan kepolisian dan militer yang lebih luas. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, karena adanya *militarizes masculinity*, sebagai bentuk

maskulinitas agresif yang dibutuhkan dalam budaya prajurit. Kedua, adanya konstruksi “*in*” dan “*out*” *group*, dimana perempuan yang feminin dianggap sebagai entitas di luar kelompok sehingga menjadi objek seksual untuk ditaklukkan bagi kaum militer yang didominasi oleh kaum pria. Ketiga, populasi masyarakat sipil yang cenderung lebih lemah secara ekonomi, juga membuat pasukan perdamaian memiliki insentif untuk ditukar dengan perdagangan dan prostitusi seks. Keempat, adalah adanya imunitas hukum yang dimiliki oleh pasukan perdamaian.¹²

Pada buku kedua, dalam Bab 9 dibahas tentang akuntabilitas dalam keamanan privat dan misi pemeliharaan perdamaian publik. Bab ini melihat misi pemeliharaan perdamaian yang dapat memberi konsekuensi yang tidak disengaja terhadap isu keamanan perempuan. Tulisan ini menunjukkan minimnya respons PBB terhadap keterlibatan pasukan perdamaian dalam kasus eksploitasi dan pelecehan seksual. Selebihnya, dapat dilihat adanya agenda PBB yang berlawanan yaitu mendukung Hak Asasi Manusia (HAM) namun juga menghindari penghukuman pasukan perdamaian PBB yang terlibat dalam pelecehan seksual.¹³

Tulisan ketiga yang menjadi referensi adalah artikel dalam jurnal *Washington University Global Studies Law Review*. Tulisan ini melihat bahwa faktor-faktor yang andil bagian dalam eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB adalah pertama bahwa pasukan perdamaian merupakan pihak yang diuntungkan karena *power* lebih yang dimiliki khususnya secara ekonomi dibandingkan masyarakat sipil yang tidak terintegrasi dan memiliki permasalahan

¹² Sabrina Karim dan Kyle Beardsley, *Equal Opportunity Peacekeeping Women, Peace, and Security in Post-Conflict States* (New York : Oxford University Press, 2017), 90-95.

¹³ Maya Eichler, ed., *Gender and Private Security in Global Politics* (New York : Oxford University Press, 2015), 169-170.

ekonomi dan psikologi. Kedua, adanya budaya *hyper-masculine* mengingat mayoritas pasukan perdamaian adalah pria. Ketiga, bahwa tidak seluruh pasukan mendukung *zero-tolerance policy*. Dan terakhir, adalah bahwa adanya imunitas yang dimiliki pasukan perdamaian PBB.¹⁴

Tulisan “*Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan terhadap Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017*” ini mengacu pada kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif keterkaitan antara Republik Afrika Tengah sebagai tujuan misi perdamaian PBB, PBB sebagai organisasi internasional, misi pemeliharaan perdamaian, pasukan perdamaian, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta bagaimana PBB melihat isu tersebut, yang dielaborasi untuk mencapai temuan faktor penyebab. Selain itu, pembeda dengan kajian sebelumnya adalah penulisan ini secara lebih rinci mendeskripsikan faktor penyebab dengan lensa gender secara spesifik dalam kerangka pemikiran feminisme global/post-kolonial yang berkaitan dengan Republik Afrika Tengah sebagai “Dunia Ketiga”, konsep *power over* yang ditentang oleh feminisme, dan disertai dengan konsep-konsep gender dan maskulinitas.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran dalam merumuskan masalah hingga menganalisis fenomena sebagai pedoman penulisan. John W. Creswell menyatakan bahwa teori dalam kerangka berpikir memberi

¹⁴ Elisabeth F. Defeis, “U.N. Peacekeepers and Sexual Abuse and Exploitation: An End to Impunity,” *Washington University Global Studies Law Review* 7, no. 2 (2008) : 190-192

pandangan untuk mengarahkan peneliti mengenai isu mana yang penting, bagaimana peneliti menempatkan diri dalam penelitian, dan bagaimana penulisan akan dilakukan.¹⁵

Dalam kerangka berpikir dipaparkan mengenai pendekatan apa yang digunakan beserta teori, perspektif, dan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan feminisme dengan perspektif feminisme global/post-kolonial. Berbagai konsep pendukung pun digunakan seperti konsep *power over*, dan gender.

Feminisme mulai berkembang tahun 1980an dalam Hubungan Internasional (HI) dalam debat keempat dan membuka ruang pengembangan bagi para feminis.¹⁶ Feminisme dalam HI secara umum membahas ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana ketidaksetaraan tersebut berpengaruh dalam dunia politik.¹⁷ *Feminist writings* dalam HI melihat bahwa perempuan merupakan pihak yang dirugikan dalam sebagian besar aktivitas politik dan ekonomi. Pendekatan feminisme ini membahas adanya ketidaksetaraan gender, perilaku dan ekspektasi yang dipelajari yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa hubungan internasional merupakan suatu hal yang *gendered*. Pandangan ini secara umum melihat bahwa dunia berada dalam *masculine way* yang cenderung lebih memiliki preferensi laki-laki. Dalam institusi internasional, pandangan ini menggambarkan adanya relasi *power*, termasuk

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches second ed.*, (California : SAGE Publications, 2009), 148-149.

¹⁶ Thomas Diez, Ingvild Bode dan Aleksandra Fernandes Da Costa, *Key Concepts in International Relations*, (London: SAGE Publications, 2011), 50.

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches 5th Edition*, (United Kingdom : Oxford University Press, 2013), 241-242.

mengenai relasi dalam gender.¹⁸ Feminis dalam HI menaruh perhatian pada perang dan militer, bagaimana militer dapat menjadi ancaman bagi keamanan perempuan dan kelompok yang rentan. Feminisme dalam HI cenderung melihat individu dalam struktur sosial sebagai *level of analysis*. Teori feminisme secara umum pun menjadi acuan feminis dalam HI untuk melihat berbagai isu gender hingga hierarki dalam hubungan sosial.¹⁹

Perspektif dalam feminisme yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah feminisme global/post-kolonial yang ditulis oleh Rosemarie Tong. Feminisme global/post-kolonial ini menekankan pada isu kolonialisme dan melihat bahwa persoalan penindasan seksual dan reproduksi lebih terkait dengan persoalan ekonomi dan politik dari berbagai kebijakan baik nasional maupun internasional.²⁰ Feminisme global/post-kolonial melihat bagaimana penindasan terhadap perempuan merupakan sebuah hal yang berhubungan satu sama lain. Penindasan yang terjadi dalam suatu tempat, sering kali terjadi karena terpengaruh oleh penindasan di tempat lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang bebas dari penindasan hingga penindasan terhadap perempuan benar-benar hilang dari muka bumi. Perempuan di Dunia Ketiga lebih dirugikan dalam isu gender dibandingkan dengan aktor-aktor dalam Dunia Pertama. Di samping itu, isu gender berkaitan dengan penindasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi pula di Dunia Ketiga. Feminisme global/post-kolonial menyatakan bahwa *the personal*

¹⁸ Clive Archer, *International Organizations 3rd Edition*, (London: Routledge, 2001), 166-168

¹⁹ J. Ann Tickner, *Gendering World Politics Issues and Approaches in the Post-Cold War Era*, (New York : Columbia University Press, 2001), 4.

²⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 138-139.

and the political are one. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa hubungan privasi laki-laki dan perempuan merupakan gambaran hubungan dalam tatanan sosial yang lebih besar. Feminisme ini juga melihat bagaimana isu ekonomi dan gender merupakan isu yang tidak memiliki batas dan saling mendasari.²¹ Dunia Ketiga dalam paham feminisme global/post-kolonial tersebut cenderung mengarah pada negara-negara berkembang bekas jajahan.

Tujuan utama dalam para feminis dunia pertama dan ketiga adalah mengenai hak perempuan dalam kebebasan untuk memilih dan kuasa untuk mampu mengendalikan hidup perempuan tersebut. Pengendalian yang dimaksud adalah adanya otonomi dan martabat atas tubuh perempuan. Selanjutnya adalah mengenai penghilangan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan melalui tatanan sosial-ekonomi, baik secara nasional maupun internasional.²²

Konsep *power over* dari Hans Morgenthau yang ditentang oleh feminis, J. Ann Tickner, digunakan dalam penelitian ini. Konsep *power over* ini menggambarkan adanya hubungan *power* yang asimetris antar aktor yang berupa kontrol dan dominasi seorang manusia akan manusia yang lain. Dalam hubungan internasional, *power over* ini didominasi oleh karakter maskulin. Bahkan dalam konsep ini, tindakan amoral oleh manusia politik merupakan hal yang bijaksana. Ann Tickner menolak paham *power over* dan penolakan tersebut diformulasikan dalam pandangan feminisme. Pertama, bahwa hukum objektif sifat dasar manusia selama ini cenderung maskulin. Hal tersebut harus diubah menyadari bahwa sesuatu yang

²¹ Rosemarie Tong, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, (Colorado : Westview Press, 2009), 215-218.

²² Charlotte Bunch, "Prospects for Global Feminism," dalam *Feminist Frameworks*, 3rd ed., ed Alison M. Jaggard dan Paula S. Rothenberg (New York: McGraw-Hill, 1993), 250.

objektif mengandung dua karakter yang maskulin dan feminin. Kedua, kepentingan nasional tidak hanya mengenai *power* yang *zero sum game*, namun bersifat kooperatif. Ketiga, *power* sebagai dominasi dan kontrol yang bersifat maskulin tidak sepenuhnya valid. Dibutuhkan *power* yang bersifat pemberdayaan kolektif yang berkarakter feminin. Keempat, segala tindakan politik memiliki signifikansi moral dan tidak bisa dipisahkan. Kelima, feminisme menyadari bahwa moral dalam negara tertentu dapat berbeda dengan prinsip moral yang universal. Namun, perlu dicari elemen moral bersama untuk membangun komunitas internasional. Keenam, feminisme menolak adanya otonomi yang maskulin dari politik karena akan memisahkan perempuan dari dunia politik.²³

Konsep pendukung dalam penulisan ini adalah mengenai gender. Gender merupakan analisis kategori utama dalam debat teori feminisme.²⁴ Gender merupakan perilaku dan ekspektasi yang secara sosial dipelajari untuk membedakan maskulinitas dan feminitas.²⁵ Gender juga dilihat sebagai suatu konsep karakter sosial yang hanya dianggap sebagai suatu hal yang berkaitan dengan keanggotaan biologis perempuan dan laki-laki. Gender dapat pula dilihat sebagai sebuah diskursus yang membentuk, memberi konstruksi, dan memberi makna dalam kehidupan sosial dan politik.²⁶

Karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki adalah maskulinitas seperti kekuatan, perlindungan, rasionalitas, agresi, kehidupan publik, dominasi dan kepemimpinan.

²³ J. Ann Tickner, "Hans Morgenthau's Principles of Political Realism : A Feminist Reformulation." *Millenium* 17 (1998): 437-438

²⁴ Tickner, *Gendering World Politics Issued and Approaches in the Post-Cold War Era*, *Op.Cit.*, 5.

²⁵ Jackson dan Sorene, *Loc.cit.*,

²⁶ Laura Sjoberg dan Sandra Via, ed., *Gender, War, and Militarism Feminist Perspective*. (California : Praeger, 2010), 3-4.

Sedangkan feminitas yang diasumsikan dimiliki oleh perempuan, digambarkan oleh kelemahan, kerapuhan, emosi, pasif, privasi, pengabdian, dan kepedulian.²⁷ Maskulinitas merupakan sistem hubungan *power* antar laki-laki maupun antara perempuan dan laki-laki. Maskulinitas dinilai lebih dibandingkan dengan feminitas dan keduanya memiliki sistem linguistik yang tergambar dalam dikotomi. Dikotomi maskulinitas dan feminitas dapat dihubungkan dengan kata sifat yang cenderung memiliki arti berlawanan seperti keras/lembut, rasional/irasional, kuat/lemah, pikiran/tubuh, dominan/penurut, aktif/pasif, hingga *aggressor*/korban. Maskulinitas dapat diartikan sebagai hubungan *power* atau selebihnya justru dapat dilihat sebagai puncak dari hierarki *power* itu sendiri. Maskulinitas erat kaitannya dengan nilai dan aktivitas sedangkan feminitas merupakan hal yang pasif. Dalam dunia militer pun, prajurit dilihat sebagai karakter atau entitas yang maskulin karena memiliki sifat yang kuat secara fisik, aktif, memiliki kapasitas untuk melakukan kekerasan, logis, dan mampu berpikir strategis.²⁸ Maskulinitas tidak semata-mata dilihat dari jenis seksual individu, namun institusi atau organisasi dalam dunia internasional dapat memiliki norma maskulinitas yang hegemonik apabila didominasi oleh laki-laki.²⁹

Karena menggunakan feminisme global/post-kolonial, penelitian ini melihat bagaimana para perempuan Dunia Ketiga yang menjadi korban penindasan secara

²⁷ *Loc.cit.*,

²⁸ Charlotte Hooper, *Manly States, Masculinities, International Relations, and Gender Politics*, (New York : Columbia University Press, 2001), 43-48.

²⁹ Annica Kronsell, "Methods for Studying Silence: gender analysis in institutions of hegemonic masculinity", dalam *Feminist Methodologies for International Relations* ed. Brooke A. Ackerly, Maria Stern, dan Jacqui True, (New York : Cambridge University Press, 2006), 108.

seksual yang berhubungan dengan isu politik dan ekonomi. Di mana tujuan pengendalian dalam otonomi dan martabat atas tubuh perempuan belum tercapai.

Selain itu dalam konsep *power over* dan gender melihat bagaimana pasukan pemelihara perdamaian PBB memiliki *power* dan sifat maskulinitas sebagai *aggressor* untuk mengeksploitasi perempuan dan anak-anak di Dunia Ketiga yang dilihat sebagai korban yang *powerless*. Konsep *power over* tersebut akan mengarahkan penulis untuk melihat adanya *power relations* antara pasukan pemelihara perdamaian, sebagai pelaku, dan masyarakat sipil, sebagai korban eksploitasi dan pelecehan seksual.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan juga kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif, terdapat pertanyaan dan prosedur yang muncul, lalu pengumpulan data, analisis data secara induktif, kemudian penulis dapat menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh, dan menuliskan secara lebih fleksibel.³⁰

³⁰ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017), 18.

Metode penelitian kualitatif secara umum memiliki tujuan untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna, proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati.³¹ Penggunaan metode kualitatif ini mempermudah pembahasan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi dan pelecehan seksual dalam MINUSCA pada tahun 2015-2017 mengingat adanya perilaku sosial yang dapat ditafsirkan. Selain itu, variabel eksploitasi dan pelecehan seksual sebagai sebuah fenomena sosial juga lebih mudah dianalisa menggunakan metode kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif “*Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak-Anak dalam MINUSCA pada tahun 2015-2017*”, jenis penulisan yang digunakan adalah jenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif karena mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian di Republik Afrika Tengah pada tahun 2015-2017.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis arsip dan internet serta wawancara. Data digunakan adalah berupa dokumen-dokumen melalui internet yang diakses secara langsung melalui *website* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data-data yang lain dicari melalui studi literatur, buku, buku elektronik, artikel jurnal, internet, laporan, dan dokumen resmi. Penulis juga

³¹ *Loc.cit.*

melakukan wawancara menggunakan media sosial *Whatsapp* dengan Fitri Bintang Timur, Ph.D. Beliau adalah seorang peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika dari penelitian mengenai faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017 secara umum dituliskan menjadi 4 bagian, sebagai berikut :

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II berfokus pada isu eksploitasi dan pelecehan seksual secara umum dalam PBB. Bab II dibagi dalam empat subbab. Bab II membahas isu eksploitasi dan pelecehan seksual yang secara umum bertentangan dengan PBB dan misi perdamaian, kasus eksploitasi dan pelecehan seksual secara umum di PBB, dan respons PBB terhadap kasus tersebut.

Bab III dibagi menjadi empat subbab yang membahas secara spesifik isu eksploitasi dan pelecehan seksual dalam MINUSCA yang menjelaskan. Bab III pada awalnya membahas ketidakstabilan politik dan kemiskinan di Republik Afrika Tengah. Lalu penulis menjabarkan mengenai misi perdamaian di Republik Afrika Tengah sebagai respons ketidakstabilan di negara tersebut hingga terakhir, kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi dalam MINUSCA

Lalu, pada Bab IV penulis menjabarkan tiga faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual dalam MINUSCA. Dan pada Bab V, penulis memberi kesimpulan penelitian ini.

Dan pada akhirnya, dalam Bab V menyimpulkan temuan faktor penyebab eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian terhadap perempuan dan anak-anak dalam MINUSCA tahun 2015-2017.